

PERNYATAAN SIKAP SUARA PEREMPUAN PAPUA BERSATU

MENYIKAPI KEKERASAN NEGARA PSN DAN MILITERISME DI TANAH PAPUA

Kami yang tergabung dalam Suara Perempuan Papua Bersatu mengecam pembantaian yang dilakukan oleh TNI kepada masyarakat sipil di Distrik Kembru, Puncak, Papua Tengah pada 14 April 2026 yang mengakibatkan belasan korban tertembak, diantaranya ada tiga balita serta ibu hamil.

Perempuan dan anak merupakan korban yang paling rentan akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung antara TNI-Polri dan TPN-PB. Perempuan dan anak sama sekali tidak mendapatkan akses vital dasar yang harus menjadi tanggung jawab negara meliputi aspek ekososial (ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dll).

Perempuan di wilayah konflik bersenjata akan melahirkan generasi yang terputus segala akses dan kontak dari negara, kecuali senjata dan kekerasan yang akan diwarisi oleh generasi baru ini untuk melanjutkan konflik.

Contoh kasus yang kami temui, di Distrik Aifat Timur, sesudah konflik berlangsung, layanan kesehatan hanya ada satu kali dalam sebulan. Ini berdampak pada kehidupan ibu hamil, lansia serta anak-anak maupun pasien dalam keadaan darurat, hal ini tentu sangat berpengaruh bagi kasus kematian yang diakibatkan oleh struktur negara yang mengabaikan kelangsungan hidup para pengungsi.

Sekitar 107.039 (Seratus tujuh ribu tiga puluh sembilan) pengungsi internal tidak hanya hidup dalam ketakutan moncong senjata, tetapi juga kematian akibat tidak tersentuh oleh berbagai akses dasar yang menjadi tanggung jawab negara, genosida dari berbagai aspek terus menghabiskan etnis bangsa Papua.

Ini adalah dinamika kekerasan negara yang tidak akan menemukan ujungnya, selain berujungnya hidup ribuan rakyat yang direnggut oleh moncong senjata maupun pengabaian negara dalam tanggung jawab dasar Hak Asasi Manusia terhadap warga negaranya.

Dengan melihat eskalasi konflik hari ini yang semakin brutal dilakukan oleh militer dan negara Indonesia kepada masyarakat sipil di berbagai daerah di

seluruh Tanah Papua, kami dari Suara Perempuan Papua Bersatu mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara.

Konflik terus bergilir dari tahun 2018 hingga hari ini meliputi daerah seperti Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Timika, Lani Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maybrat, Tambrau, Teluk Bintuni, Dogiyai, Paniai, Deiyai.

Kembali dengan melihat kasus tragedi berdarah di Puncak Papua baru-baru ini, kami dari Suara Perempuan Papua Bersatu mengecam tindakan tidak manusiawi ini. Serta mengajak seluruh rakyat bangsa Papua untuk bersuara atas kejahatan kemanusiaan yang sedang berlangsung di Tanah Papua.

Tuntutan Suara Perempuan Papua Bersatu

1. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto segera tarik Militer Organik dan Non Organik di seluruh tanah Papua.
2. Negara segera bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan di tanah Papua sejak aneksasi 1962 sampai 2026.
3. Presiden Republik Indonesia selaku panglima tinggi TNI, segera mengakui TNI sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan di Papua.
4. Tangkap dan Adili Anggota TNI pelaku pengeboman rakyat sipil di distrik Kemburu, Kabupaten Puncak pada tanggal 14 April 2025. Yang terdiri dari korban meninggal dunia 15 orang dan 7 orang luka-luka.
5. Bebaskan seluruh Tahanan Politik Papua
6. Tolak Pembangunan Bandara Antariska di pulau Biak.
7. Tolak PSN di seluruh Indonesia dan Tanah Papua.
8. Hentikan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil.
9. TNI segera hentikan Teror, Intimidasi dan Tangkap Paksa di wilayah konflik; Maybrat, Tambrau, Nduga, Intan Jaya, Puncak dan seluruh Tanah Papua.
10. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, demi terwujudnya keadilan bagi rakyat sipil yang menjadi korban kejahatan negara Indonesia.

(JAYAPURA 23 April 2026)

Koordinator: Iche Murib. (+62 812-4844-6788)

Anggota

1. Lami Faan
2. Sayang Mandabayan
3. Ruth Bosawer
4. Maria Magdalena
5. Yanty Way